

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang belum tuntas terselesaikan terutama di negara berkembang, artinya kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap negara.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang ini, sehingga berbagai perencanaan, kebijakan, serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, mengangkat dan mengentaskan mereka dari situasi yang serba sulit dan tidak menguntungkan pada tingkat kehidupan yang lebih baik (Solihah A, 2006:1).

Program pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11,3%) pada tahun 1996. Namun, berbagai hal yang terjadi di Indonesia membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti krisis ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997 yang menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat drastis akibat krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis sosial politik. Jumlah penduduk miskin naik menjadi 49,50 juta jiwa (24,23% dari jumlah penduduk Indonesia) pada tahun 1998.

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Karena itu kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *human development index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia Indonesia.

Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2009 menurun dibandingkan dengan tahun 2008, dari peringkat 109 menjadi 111 di antara 182 negara. Adanya penurunan peringkat IPM Indonesia yang ke-111 ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia Indonesia khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, tidak lebih baik dari sebelumnya (Antara News, 12 Februari, 2009). Hal ini jelas menandakan bahwa IPM Negara Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Kondisi kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif, walaupun standar garis kemiskinannya meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase
Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 1998-2008

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)		Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
1998	96 959	72 780	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	92 409	74 272	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	91 632	73 648	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	100 011	80 382	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	130 499	96 512	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	138 803	105 888	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	143 455	108 725	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	150 799	117 259	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	174 290	130 584	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	187 942	146 837	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	204 896	161 831	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2008

Dari tabel diatas tampak bahwa garis kemiskinan di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan selalu berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 1998-2005 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 14,40 juta jiwa, yaitu 49,50 juta jiwa pada tahun 1998 menjadi 35,10 juta jiwa pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 24,23% pada tahun 1998 menjadi 15,97% pada tahun 2005. Pada bulan Maret dan Oktober tahun 2005 pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga BBM ini menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95% selama periode tahun 2005-Maret tahun 2006. Akibatnya jumlah penduduk miskin naik sebesar 4,20 juta jiwa yaitu dari 35,10 juta jiwa (15,97%) pada tahun 2005 menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 %) pada tahun 2006.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta jiwa (15,42%), dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan

Maret tahun 2007 yang berjumlah 37,17 juta jiwa (16,58%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 tercatat 37,2 juta jiwa dan sekitar 63,4 % berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro dengan kepemilikan lahan lebih kecil dari 0,3% hektar (BPS 2007). Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan berjumlah 34,96 juta jiwa, hal ini berkurang dari tahun 2007 sebesar 37,2 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 33,714 juta jiwa (Kompas, 13 Februari 2009).

Meskipun angka kemiskinan berkurang, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, misalnya masih banyak munculnya kasus busung lapar, masalah-masalah sosial lainnya seperti masih banyaknya para pengemis dan gelandangan yang setiap tahunnya bertambah di kota-kota besar.

Menurut data BPS tahun 2008, jumlah penduduk miskin terbesar berada di pulau Jawa yaitu di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Barat. Berikut ini data penduduk miskin per Propinsi:

Tabel 1.2
Penduduk Miskin Per Propinsi
Tahun 2008

Propinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan +Pedesaan	(%)
Nanggroe Aceh Darussalam	195,9	763,9	959,7	2,74
Sumatera Utara	761,7	852,1	1613,8	4,62
Sumatera Barat	127,3	349,9	477,2	1,37
Riau	245,1	321,6	566,7	1,62
Jambi	120,1	140,2	260,3	0,74
Sumatera Selatan	514,7	734,9	1249,6	3,6
Bengkulu	131,8	220,2	352,0	1,00
Lampung	365,6	1226,0	1591,6	4,55
Kep. Bangka Belitung	36,5	50,2	86,7	0,24
DKI Jakarta	379,6	0	379,6	1,08
Kepulauan Riau	69,2	67,1	136,4	0,39
Jawa Barat	2617,4	2705,0	5322,4	15,22
Jawa Tengah	2556,5	3633,1	6189	17,70
DI. Yogyakarta	324,2	292,1	616,3	1,77
Jawa Timur	2310,6	4340,6	6651,3	19,02
Banten	371,0	445,7	816,7	2,33
Bali	115,1	100,7	215,7	0,62
Nusa Tenggara Barat	560,4	520,2	1080,6	3,09
Nusa Tenggara Timur	119,3	979,1	1098,3	3,14
Kalimantan Barat	127,5	381,3	508,8	1,46
Kalimantan Tengah	45,3	154,6	200,0	0,57
Kalimantan Selatan	81,1	137,8	218,9	0,63
Kalimantan Timur	110,4	176,1	286,4	0,82
Sulawesi Utara	72,7	150,9	223,5	0,64
Sulawesi Tengah	60,9	463,8	524,7	1,50
Sulawesi Selatan	150,8	880,9	1031,7	2,95
Sulawesi Tenggara	27,2	408,7	435,9	1,25
Gorontalo	27,5	194,1	221,6	0,63
Sulawasi Barat	48,3	122,8	171,1	0,5
Maluku	44,7	346,7	391,3	1,12
Maluku Utara	9,0	96,0	105,1	0,30
Irian Jaya Barat	9,5	237,0	246,5	0,70
Papua	31,6	701,5	733,1	2,09
Indonesia	12.768,5	22.194,8	34.963,3	100

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, BPS

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Barat. Ketiga Propinsi tersebut mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya yang berada di Indonesia. Dari tabel diatas,

Propinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5.322,4 ribu jiwa pada tahun 2008. Seperti halnya tingkat kemiskinan nasional, dalam lingkup Propinsi Jawa Barat tingkat kemiskinan penduduk mengalami peningkatan. Selain peningkatan tersebut, tingkat kemiskinan di Jawa Barat ternyata lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang mempunyai nilai indeks kemiskinan masyarakat (IKM) sebesar 25,2 (Bapeda Jabar, 2007). Dengan nilai indeks kemiskinan masyarakat sebesar 25,2 berdasarkan klasifikasi *United National Development Program* (UNDP), derajat kemiskinan penduduk Jawa Barat berada pada klasifikasi menengah tinggi.

Meskipun pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin bulan Maret 2009 mengalami penurunan sebesar 338.870 orang (1,05 persen) dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 5.332,4 ribu. Berdasarkan data diatas nampak bahwa, secara keseluruhan jumlah kemiskinan di Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Kemiskinan yang terjadi di setiap daerah tidak terlepas dari kepadatan penduduk di daerah tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa terdapat suatu hubungan yang positif antara tingkat kepadatan penduduk dan kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi jumlah penduduk per Km² atau per hektar semakin kecil ladang untuk bertani atau semakin kecil kesempatan kerja dan semakin banyak orang yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan (Tulus Tambunan, 2002:96).

Pulau Jawa merupakan pulau tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya. Begitupun dengan Jawa

Barat, tingkat penduduknya yang paling padat diiringi dengan tingkat jumlah kemiskinan yang besar pula. Berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebesar 3,148.951 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kota Bandung sebesar 2,414.704 jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2007 sebanyak 177.744 keluarga, sementara pada tahun 2008 sebanyak 279.692 keluarga. Sedangkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Barat menyebutkan, terdapat 110.121 keluarga prasejahtera di Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Jumlah ini meningkat menjadi 144.055 keluarga pada tahun 2008 (Kompas 5 November, 2009). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang terdapat di Kabupaten Bandung.

Hasil pendataan keluarga pada tahun 2009 yang dilaksanakan bulan Januari-Desember 2009 oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), telah menghimpun data keluarga miskin di Kabupaten Bandung sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabag Humas Pemkab Bandung, Edi Sujadi Santana yang dikutip dalam Pikiran Rakyat tanggal 14 Januari 2010 yang menyatakan bahwa ;

“Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung menjadi Kecamatan paling banyak warga miskinnya, yakni 23.184 kepala keluarga (KK). Sementara itu, Kecamatan Margahayu memiliki paling sedikit keluarga miskin (2.522 KK). Margahayu paling sedikit memiliki keluarga miskin, yakni 457 KK Pra-Keluarga Sejahtera (KS) dan KS-1 2.065 KK. "Jumlah tersebut 0,3 persen dari jumlah kepala keluarga di Margahayu, yakni 27.286 KK.

Berdasarkan pendataan tersebut, terdapat sebanyak lima Kecamatan masuk wilayah miskin kategori tinggi, yaitu Paseh, Majalaya, Baleendah, Ciparay, dan Pacet. "Sementara itu, kecamatan yang kemiskinannya rendah sebanyak sepuluh Kecamatan dan sisanya enam belas Kecamatan masuk kategori sedang." tuturnya. Di Kec. Paseh terdapat keluarga Pra-KS sebanyak 10.151 KK dan KS-1 sejumlah 13.033 KK (2,8 persen) dari jumlah KK Kec. Paseh sebanyak 32.629 KK. "Bahkan, ada tiga desa di Kec. Paseh yang masuk kategori lima desa termiskin yakni Desa Drawati dengan tingkat kemiskinan 85,6 persen. Desa Cipedes 84,2 persen, dan Desa Sindangsari 82,9 persen.

Sebagaimana data yang diperoleh, menurut indikator BPS maupun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung sebesar 279.692. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 63,54%.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) bahwa pada tahun 2009 terdapat lima Kecamatan masuk wilayah miskin kategori tinggi yaitu Paseh, Majalaya, Baleendah, Ciparay, dan Pacet. Kecamatan Paseh merupakan Kecamatan yang paling banyak jumlah keluarga miskin yaitu 23.184 kepala keluarga (KK). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil objek penelitiannya di Kecamatan Paseh.

Kecamatan Paseh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh dan petani. Berdasarkan data pra penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh data bahwa terdapat 23.184 KK miskin yang tersebar pada 12 desa yang terdapat di Kecamatan Paseh. Data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Kepala Keluarga Miskin
di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
Tahun 2009

No	Nama desa	Jumlah Kepala Keluarga Miskin
1	Loa	1987
2	Sukamanah	2138
3	Sukamantri	2662
4	Cijagra	1250
5	Drawati	2342
6	Cigentur	1113
7	Sindangsari	2636
8	Cipaku	2515
9	Cipedes	2383
10	KarangTunggal	1008
11	Mekarpawitan	1760
12	Tangsimekar	1390
Jumlah		23.184

Sumber: Data Kantor Kecamatan Paseh, 2009

Berdasarkan tabel 1.3 di atas tampak bahwa terdapat beberapa desa yang angka kemiskinannya besar dibandingkan desa lain yaitu desa sukamantri, sindangsari, cipaku, dan cipedes.

Pengukuran angka kemiskinan ini didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Paseh, dilihat dari keluarga pra sejahtera dan KS-1 (keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi), yang dikatakan keluarga pra sejahtera adalah dilihat dari anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari atau lebih. Anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian. Rumah yang ditempati keluarga tidak mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. Bila ada anggota keluarga sakit tidak di bawa ke sarana kesehatan, dan semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga tidak bersekolah.

Permasalahan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Paseh menjadi masalah yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, Sharp (dalam Mudrajat Kuncoro, 2002:120) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sudut ekonomi antara lain:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidakmerataan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya mempunyai sumberdaya yang terbatas dengan kualitas rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upah rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena tingkat pendidikan yang rendah.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal.

Sedangkan, menurut Tulus Tambunan (2001:99) mengatakan bahwa:

“Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain adalah sebagai berikut: laju pertumbuhan output atau produktivitas tenaga kerja, tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia). Tingkat inflasi, fasilitas umum seperti (pendidikan dasar, kesehatan, transportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah; etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, politik, bencana alam dan peperangan”.

Kemiskinan terjadi karena adanya produktivitas yang rendah. Penduduk di Kecamatan Paseh sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh, tingkat produktivitasnya dilihat dari jam kerja serta pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja. Kebanyakan dari penduduk miskin memiliki luas lahan yang sempit atau bahkan mereka tidak memiliki lahan dan bekerja pada orang lain sebagai buruh tani.

Selain produktivitas yang rendah, mereka yang hidup miskin disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat miskin.

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemiskinan, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Psacharopoulos dkk (dalam Mugi Lastiadi, 2003:37) yang telah menekankan peranan pendidikan di dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan.

Dejanvry dan Sadoulet (dalam Mugi Lastiadi, 2003:37) menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak-anak mereka. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pendapatan.

Masyarakat miskin biasanya mempunyai pendapatan yang rendah, dengan pendapatan yang rendah maka biaya untuk pendidikanpun sangat terbatas, apalagi dengan adanya biaya pendidikan yang semakin mahal, sehingga kebanyakan dari warga miskin tidak bersekolah. Kebanyakan dari mereka hanya menempuh pendidikan sampai tingkat menengah. Bahkan sebagian dari mereka hanya lulusan sekolah dasar. Sebagian besar penduduk miskin di Kecamatan Paseh tingkat pendidikannya hanya lulusan SD dan SMP yang berjumlah sebesar 22.574 jiwa dan angka putus sekolah usia 7-15 sebesar 2.179 jiwa.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk yang Putus Sekolah Usia 7-15 Tahun

No	Nama desa	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Tahun
1	Loa	237
2	Sukamanah	143
3	Sukamantri	211
4	Cijagra	107
5	Drawati	232
6	Cigentur	84
7	Sindang sari	326
8	Cipaku	417
9	Cipedes	134
10	Karang tunggal	77
11	Mekarpawitan	146
12	Tangsimekar	65
Jumlah		2179

Sumber : Data Kecamatan Paseh, 2009

Berdasarkan tabel 1.4 tampak bahwa jumlah penduduk yang putus sekolah di Kecamatan Paseh masih tergolong tinggi, meskipun ada sebagian dari beberapa desa angka penduduk yang putus sekolah sedikit, tetapi secara keseluruhan dari 12 desa yang terdapat di Kecamatan Paseh angka penduduk yang putus sekolah masih banyak. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Paseh masih rendah dengan masih banyaknya angka putus sekolah.

Tingkat pendidikan dibagi ke dalam 5 kategori yaitu tidak tamat SD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan di Kecamatan Paseh tergolong sangat rendah kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD dan SMP. Berikut ini data tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Paseh

No	Nama desa	Tidak Tamat SD	SD + SMP	SMA	PT
1	Loa	251	1972	347	74
2	Sukamanah	226	2217	870	152
3	Sukamantri	471	2823	852	85
4	Cijagra	200	1418	276	35
5	Drawati	465	1991	264	15
6	Cigentur	244	971	260	39
7	Sindangsari	437	2517	199	24
8	Cipaku	261	2817	720	132
9	Cipedes	692	1810	274	52
10	Karangtunggal	172	1185	34	4
11	Mekarpawitan	223	1999	312	63
12	Tangsimekar	972	854	311	56
	Jumlah	4.614	22.574	4719	731

Sumber: Data Kecamatan Paseh, 2009

Tabel 1.5 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Paseh sangat rendah, kebanyakan dari mereka sekolah sampai tamat SD dan SMP, bahkan angka putus sekolah masih sangat tinggi yaitu 4.614, dan masih sedikit masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi.

Pada umumnya masyarakat miskin mempunyai jumlah anggota keluarga yang banyak. Jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan, tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografi yakni: kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi tentu akan meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun demikian, tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia kebanyakan berasal dari kategori penduduk golongan miskin. Masyarakat miskin mempunyai anggota keluarga

yang banyak, dengan kebanyakan dari anggota keluarga yang berusia di bawah 15 tahun, hal tersebut mengakibatkan masih menjadi tanggungan dalam keluarga.

Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di pedesaan adalah 4,8 orang (Gregorius Sahdan, 2005).

Jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi pendapatan, karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin tinggi biaya yang harus ditanggung oleh kepala keluarga. Serta jika semua anggota keluarga masih berada di bawah umur angkatan kerja, maka beban biaya yang harus di tanggung oleh kepala keluarga semakin besar. Beban tanggungan keluarga dapat menjadi beban hidup bagi keluarganya apabila tidak bekerja.

Menurut MP Todaro (2004:55) ciri-ciri umum dari setiap negara berkembang dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori utama sebagai berikut:

1. Standar hidup yang relatif rendah, ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kondisi kesehatan yang buruk, dan kurang memadainya sistem pendidikan.
2. Produktivitas yang rendah
3. Tingkat pertumbuhan populasi dan beban tanggungan yang tinggi
4. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah).
5. Pasar yang tidak sempurna, dan terbatasnya informasi yang tersedia pun.
6. Dominasi, dependensi, dan vulnerabilitas dalam hubungan-hubungan internasional.

Salah satu penyebab dari kemiskinan dipicu oleh lemahnya etos kerja, sikap hidup yang fatalis dan salah dalam memahami makna rizki, malas berusaha termasuk malas mengembangkan kemampuan diri serta terperangkap pada budaya miskin itu sendiri. Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku

yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kebanyakan dari masyarakat miskin terperangkap dalam budaya miskin sendiri dikarenakan mereka menganggap bahwa mereka miskin sudah takdir, dan pasrah dalam keadaan yang sudah mereka terima. Serta mereka mempunyai sikap dan tidak mau berusaha mengubah keadaan agar menjadi lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gregorius Sahdan (2005) yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat.

Kemiskinan yang diderita oleh seseorang, suatu keluarga atau sekelompok masyarakat karena sikap mental individu itu sendiri atau keluarga dan masyarakat itu sendiri. Kebiasaan hidup boros, tidak mau bekerja keras, tidak memiliki rencana masa depan, dan sikap gampang menyerah pada nasib merupakan beberapa contoh sikap mental yang bisa menyebabkan seseorang hidup dalam kemiskinan (Stepanus Rahoyo, 2008).

Berpijak pada latar belakang diatas, masalah kemiskinan masyarakat sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengambil judul mengenai;

“ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Masyarakat”

(Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat, karena itu penulis membatasi permasalahan yang diteliti. Dengan rumusan permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produktivitas terhadap kemiskinan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh beban tanggungan keluarga terhadap kemiskinan masyarakat?
4. Bagaimana pengaruh sikap mental terhadap kemiskinan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh produktivitas terhadap kemiskinan masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan masyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh beban tanggungan keluarga terhadap kemiskinan masyarakat.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap mental terhadap kemiskinan masyarakat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan ini sangat berguna karena:

1. Secara Teoritis

Bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bisa memberikan informasi mengenai kemiskinan masyarakat.
- b. Bisa memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan Ekonomi, khususnya Ekonomi Pembangunan mengenai kemiskinan.

